

**KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA BADAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BP2KB)
DALAM MENINGKATKAN JUMLAH AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

*)Aplonia Pala
e-mail: aploniamonteiro@yahoo.co.id
**)Salesius Vitalis Kolne
e-mail: sales.kolne@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi dilihat dari kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dilakukan. Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami permasalahan yang sangat kompleks berkaitan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak merata dari berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosio politik dan lain-lain. Untuk mengatasi permasalahan kependudukan tersebut Pemerintah Kabupaten TTU berupaya mengatasinya dengan melaksanakan program Keluarga Berencana. Untuk mendukung program tersebut diperlukan kinerja yang baik dari Penyuluh KB pada BP2KB. Program KB pada BP2KB adalah mengarahkan dan memberikan pemahaman PUS menjadi akseptor aktif KB. Kinerja Penyuluh KB dalam memotivasi PUS menjadi akseptor aktif KB dapat dilihat dari aspek input-proses-output dari Penyuluh KB itu sendiri. Dalam pelaksanaan tugas sebagai penyuluh KB juga terdapat aspek-aspek pendukung dan penghambat antara lain sumber daya manusia, fasilitas yang tersedia dan dana operasional lapangan. Kinerja penyuluh KB pada BP2KB TTU belum optimal karena belum memadainya dana operasional lapangan dan pelaksanaan tugas penyuluhan oleh PPLKB belum tepat waktu, namun kekurangan tersebut masih ditopang oleh aspek-aspek yang mendukung antara lain tersedianya fasilitas yang memadai, adanya kerja sama yang baik, adanya hasil kerja yang optimal, tersedianya SDM dan adanya pelayanan administrasi program KB yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah akseptor aktif KB kabupaten TTU pada tahun 2013 sebanyak 22.146 akseptor dengan tingkat persentase akseptor aktif KB terhadap PUS sebesar 68.38% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 23.615 akseptor dengan tingkat persentase akseptor aktif KB terhadap PUS sebesar 70.32%.

Kata kunci : Kinerja, Akseptor KB, Input – Proses - Output

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang tidak merata di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah melakukan kebijaksanaan kependudukan yang tercermin dalam program pemerintah dalam berbagai bidang yakni: 1) Program kesejahteraan pertanian, 2) Program transmigrasi, 3) Program perbaikan di bidang pertanian, 4) Program di bidang pendidikan, 5) Program KB. Salah satu program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten TTU adalah mengarahkan dan memotivasi Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi akseptor KB. Jumlah akseptor KB di TTU sesungguhnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa banyak Pasangan Usia Subur yang telah menyadari pentingnya merencanakan jumlah anak dalam keluarga dengan alasan meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga dan juga peningkatan pendidikan anak pada masa mendatang. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah akseptor aktif KB kabupaten TTU pada tahun 2013 sebanyak 22.146 akseptor dengan tingkat persentase akseptor aktif KB terhadap PUS sebesar 68,38% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 23.615 akseptor dengan tingkat persentase akseptor aktif KB terhadap PUS sebesar 70,32% (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana TTU dalam TTU dalam Angka 2014).

Metode kontrasepsi yang digunakan oleh akseptor pada tahun 2014 bervariasi sesuai dengan keinginan dari akseptor antara lain: IUD (*Intra Uterine Device*) sebanyak 1.014 akseptor, MOP (*Medis Operasi Pria/Male Sterilization*) sebanyak 15 akseptor, MOW (*Medis Operasi Wanita/Female Sterilization*) sebanyak 374 akseptor, *implant* sebanyak 3.666 akseptor, *suntikan/injection* sebanyak 16.804 akseptor, *pil/piil* sebanyak 1.629

akseptor dan kondom/*condom* sebanyak 113 akseptor sehingga total akseptor KB di kabupaten TTU pada tahun 2014 sebanyak 23.615 akseptor dengan tingkat persentase akseptor aktif KB terhadap PUS sebesar 70,32%. Dari data tersebut metode yang paling banyak digunakan oleh PUS adalah metode suntikan karena lebih mudah dipahami dan lebih mudah digunakan oleh akseptor dalam merencanakan jumlah anak dalam keluarga. Dari jumlah akseptor KB di TTU sesungguhnya tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi peningkatan namun di sisi lain bahwa peningkatan jumlah akseptor KB ini belumlah berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan keluarga karena akseptor KB lebih banyak berasal dari pasangan yang sama-sama bekerja sehingga KB merupakan salah satu cara untuk menunda kehamilan karena kesibukan pekerjaan dan susah mendapatkan pengasuh anak yang bertanggung jawab. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa justru PUS dari keluarga yang tidak memiliki penghasilan yang mapan menolak menjadi akseptor KB dengan alasan banyak anak banyak rezeki. Rendahnya kesadaran PUS dalam ber-KB dari keluarga kurang mapan ini karena sesungguhnya kurang adanya sosialisasi atau penyuluhan dari petugas Penyuluh Lapangan KB (PPLKB) di TTU. Masyarakat atau PUS di tempat terpencil akan termotivasi menjadi akseptor KB jika selalu ada sosialisasi dari instansi terkait tentang pentingnya KB bagi keluarga akseptor sendiri. Berdasarkan keadaan di lapangan pada tahun 2013 dan 2014 bahwa KB di BP2KB kabupaten TTU belum optimal karena beberapa faktor antara lain: 1) Dana operasional Lapangan untuk kegiatan penyuluhan belum mencukupi, 2) Pelaksanaan tugas oleh PPLKB belum tepat waKTU.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan pokok adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja PKB pada BP2KB dalam meningkatkan jumlah akseptor KB di kabupaten TTU?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat kinerja PKB pada BP2KB dalam meningkatkan jumlah akseptor KB di kabupaten TTU?

C. TINJAUAN TEORITIS

1. Kinerja

Menurut Widodo (77:2004) kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai dalam ukuran kuantitas dan kualitas. Atau dengan kata lain kinerja adalah pencapaian hasil kerja atas dasar pembagian tugas secara jelas dengan berpedoman pada keputusan resmi dari organisasi dan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja antara lain: 1) Faktor internal merupakan faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang yakni kemampuan, kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan tertentu, 2) Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar seseorang seperti perilaku, sikap, tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan, pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi.

Menurut Mangkunegara (18:2005) aspek-aspek nilai dalam kinerja antara lain kesetiaan, hasil kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, tanggung jawab dan kecakapan. Masih menurut Mangkunegara (23:2005) beberapa langkah yang dapat digunakan dalam meningkatkan

kinerja pegawai antara lain : 1) Membuat pola pikir yang modern, 2) Kelola kinerja, 3) Bekerja bersama karyawan, 4) Rencana secara tepat dengan sasaran yang jelas, 5) Satukan sasaran karyawan, 6) Tentukan inisiatif kinerja, 7) Jadilah orang yang mudah ditemui, 8) Berfokuslah pada komunikasi, 9) Lakukan tatap muka, 10) Hindarkan resiko pemeringkatan, 11) Jangan lakukan penggolongan, 12) Persiapkan penilaian, 13) Awali tujuan secara benar, 14) Kenali sebab, 15) Akui keberhasilan, 16) Gunakan komunikasi yang kooperatif, 17) Berfokuslah pada perilaku dan hasil, 18) Perjelas kinerja, 19) Perlakuan konflik dengan apik, 20) Pergunakan disiplin bertahap, 21) Kinerja dokumen, 22) Kembangkan karyawan, 23) Tingkatkan terus sistem kerja. Indikator kinerja organisasi publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia adalah input (masukan), luaran, proses, hasil, manfaat dan indikator dampak. Untuk mengukur kinerja dapat dilakukan dengan pendekatan analisis input – proses - output (LAN, 248:2004). Indikator masukan (input) meliputi semua jenis sumber daya yang digunakan dalam proses tertentu untuk menghasilkan output antara lain dana, sumber daya manusia, peralatan, material, teknologi. Indikator proses merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mengelola input menjadi output yang berbentuk program atau aktivitas berupa kecepatan, ketepatan, tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan, ketaatan pada aturan. Indikator output adalah sesuatu yang langsung dapat dicapai dari kegiatan yang dilakukan baik fisik maupun non fisik.

2. Keluarga Berencana(KB)

Keluarga Berencana merupakan upaya peningkatan kepedulian masyarakat mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera atau usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Undang-Undang No.10/1992). Menurut WHO Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu/pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Keluarga Berencana merupakan tindakan PUS untuk menentukan jumlah anak dalam keluarga demi peningkatan kesejahteraan sebuah keluarga.

Menurut BKKBN Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipi. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah PNS yang diberi tugas,tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan KB nasional yang ditempatkan di lingkungan instansi pemerintah.Berdasarkan Kepmenpan No.120 Tahun 2004 pasal 3 dan pasal 4 secara teoritis dalam menjalankan tugas dan fungsinya PLKB memiliki metode-metode sebagai berikut: 1) Pendekatan tokoh formal, 2) Pendekatan dan pemetaan, 3) Pendekatan tokoh informal, 4)

Pembentukan kesepakatan, 5) KIE oleh tokoh masyarakat, 6) Pembentukan grup pelopor, 7) Pelayanan KB, 8) Pembinaan peserta, 9) Evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

Keberhasilan pelayanan KB dapat berhasil dengan optimal harus mendapat dukungan positif dari masyarakat sebagai pendukung gerakan Keluarga Berencana dengan berpartisipasi aktif sebagai peserta KB atau akseptor KB.Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan kontrasepsi. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi atas tiga fase antara lain: 1) Fase penundaan atau mencegah kehamilan, 2) Fase penjarangan kehamilan, 3) Fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Sasaran utama akseptor KB adalah PUS dengan menggunakan alat kontrasepsi karena PUS inilah yang lebih berpeluang besar untuk menghasilkan keturunan dan dapat meningkatkan angka kelahiran. Metode-metode kontrasepsi akseptor KB dapat dipilih oleh akseptor KB itu sendiri antara lain : 1) IUD (*Intra Uterine Device*), 2) MOP (*Medis Operasi Pria/Male Sterilization*), 3) MOW (*Medis Operasi Wanita/Female Sterilization*), 4) *Implant*, 5) Suntikan/*injection*, 6) *Pil/Piil*, 7) *Kondom/Condom*.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan kinerja PKB dan faktor pendukung dan penghambat kinerja PKB pada BP2KB kabupaten TTU dalam meningkatkan jumlah akseptor KB. Kinerja Penyuluh KB dalam meningkatkan jumlah akseptor KB

ditinjau dari sudut pandang input – proses - output. Input ditinjau dari dana operasional lapangan dan fasilitas, proses dapat ditinjau dari ketepatan waktu pelaksanaan tugas dan kerja sama, output ditinjau dari hasil kerja dan pelayanan administrasi program KB. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat kinerja PKB dalam meningkatkan jumlah akseptor KB di kabupaten TTU dapat ditinjau dari sumber daya manusia, fasilitas seperti kendaraan roda dua, BKB Kit dan KIE Kit, dana operasional lapangan. Populasi dalam penelitian ini meliputi semua Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di kabupaten TTU yang tersebar pada 24 kecamatan sebanyak 34 orang PLKB dan keseluruhan akseptor KB tahun 2014 yang tersebar juga di 24 kecamatan sebanyak 23.615. Sampel atau responden dalam penelitian ini sebanyak 24 PLKB dan 10 orang akseptor KB dari beberapa metode kontrasepsi yang digunakan oleh akseptor. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: observasi, wawancara dan dokumentasi.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Input

Input bagi kinerja PKB dalam meningkatkan jumlah akseptor KB di kabupaten TTU dapat dilihat ditinjau dari dua aspek yaitu dana operasional di lapangan dan fasilitas yang digunakan PKB di lapangan. Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan jumlah akseptor KB terutama di daerah-daerah terpencil belum meningkat secara signifikan dalam menekan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk karena tingkat pemahaman PUS yang masih sangat rendah akan pentingnya KB. PUS tersebut belum

mengenal dan memahami metode-metode kontrasepsi secara baik dan benar karena kurangnya sosialisasi atau penyuluhan dari PPLKB. Kebanyakan akseptor KB mendapat informasi dari tetangga atau PUS lain yang juga belum memahami secara baik dan benar seluk beluk KB. Berdasarkan data yang didapatkan dari PPLKB bahwa kurangnya intensitas penyuluhan petugas sering terjadi karena terbatasnya dana operasional lapangan yang disediakan oleh pemerintah. Dana operasional lapangan merupakan sarana penunjang kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terutama PUS di daerah-daerah terpencil. Dengan tersedianya dana operasional yang memadai maka kinerja PPLKB di kabupaten TTU dalam memberikan penyuluhan kepada PUS akan berjalan optimal sehingga PUS lebih memahami tentang pentingnya ber-KB yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah akseptor KB di kabupaten TTU menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Selain dana operasional di lapangan yang menjadi input bagi kinerja PPLKB dalam meningkatkan jumlah akseptor KB di TTU fasilitas juga merupakan salah satu output bagi kinerja PPLKB dalam menjalankan tugasnya. Sesuai hasil pengamatan dan wawancara di lapangan banyak PPLKB yang mengeluh tidak dapat memberikan penyuluhan ber-KB kepada masyarakat dengan baik karena terbatasnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sebagai sarana pendukung kegiatan PPLKB. Dalam organisasi publik fasilitas merupakan penentu keberlangsungan suatu organisasi. Fasilitas pada BP2KB adalah BKB Kit, KIE Kit dan sarana transportasi guna mendukung pelaksanaan tugas penyuluhan di

lapangan terutama di daerah-daerah terpencil.

2. Proses

Proses berkaitan dengan kinerja PKB dalam meningkatkan jumlah akseptor KB ditinjau dari ketepatan waktu dan kerja sama yang baik dalam memberikan pelayanan KB. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara bahwa belum sadarnya PUS akan KB karena kelalaian PPLKB itu sendiri yang sering tidak tepat waktu dalam memberikan penyuluhan. Ketidaktepatan waktu dalam melaksanakan tugas ini karena sulitnya jangkauan daerah pelayanan dengan keterbatasan dana operasional di lapangan dan terbatasnya fasilitas pendukung. Ketepatan pelaksanaan tugas penyuluhan adalah mutlak adanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat dan tepat harus selalu diperhatikan oleh PPLKB sehingga tetap mempertahankan keluarga binaan terutama akseptor KB di wilayah binaan masing-masing. Penyuluh yang tepat waktu dalam memberikan pelayanan KB akan meningkatkan citra BP2KB pada umumnya sehingga jumlah akseptor KB dari PUS akan selalu meningkat dari hari ke hari menuju kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Selain ketepatan waktu yang harus diperhatikan oleh PPLKB dalam memberikan penyuluhan faktor kerja sama harus diperhatikan juga dalam proses pelaksanaan penyuluhan ber-KB. Berdasarkan pengamatan dan wawancara bahwa dalam melaksanakan tugasnya PPLKB tidak harus bekerja sendiri tetapi demi suksesnya program KB tersebut di fdaerah TTU harus ada kerja sama yang harmonis lintas sektoral baik

internal maupun internal. Dari jawaban informan sebagai akseptor KB petugas penyuluh sering tidak melibatkan unsur-unsur lain dalam penyuluhan ber-KB terutama dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat daerah setempat. Supaya program KB dapat berjalan optimal dan dapat meningkatkan jumlah akseptor KB di kabupaten TTU maka PPLKB dalam memberikan pelayanan harus melibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya baik unsur formal maupun yang non formal.

3. Output

Output kinerja PPLKB dalam meningkatkan jumlah akseptor KB di Kabupaten TTU dapat ditinjau dari hasil kerja yang dicapai oleh PPLKB pada BP2KB di kabupaten TTU. Berdasarkan hasil pengamatan, observasi dan data yang tersedia pada BP2KB TTU dalam TTU Dalam Angka tahun 2013 dan 2014 bahwa hasil kerja PPLKB TTU sudah optimal. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah akseptor aktif KB kabupaten TTU pada tahun 2013 sebanyak 22.146 akseptor dengan tingkat persentase akseptor aktif KB terhadap PUS sebesar 68.38% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 23.615 akseptor dengan tingkat persentase akseptor aktif KB terhadap PUS sebesar 70.32% (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana TTU dalam TTU dalam Angka 2014). Selain ditinjau dari hasil kerja dalam meningkatkan jumlah akseptor KB ouput PPLKB juga dapat ditinjau dari pelayanan program KB. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPLKB dan akseptor KB dapat diketahui bahwa pelayanan administrasi program KB sudah berjalan dengan efektif. Hal ini

ditandai dengan adanya pencatatan/pendataan yang lengkap dari tingkat desa sampai pada kecamatan, adanya laporan pemetaan di wilayah kerja, adanya kontrol yang baik terhadap kartu-kartu register PUS peserta KB dan pelayanan administrasi lainnya. Dengan adanya pelayanan administrasi KB yang optimal ini semakin menambah jumlah akseptor KB dari hari ke hari demi menekan pertumbuhan penduduk.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja PPLKB

Meningkatnya jumlah akseptor KB di kabupaten TTU dari tahun ke tahun sangat didukung oleh sumber daya manusia dimana PPLKB yang ada pada BP2KB TTU sudah memadai dari tingkat pendidikan dan jumlahnya mencukupi. Ada kecamatan-kecamatan yang daerah pelayanannya lebih luas dan padat penduduknya terdapat dua orang PPLKB sementara di kecamatan-kecamatan yang wilayah pelayanannya kecil ditempatkan satu orang PPLKB. Jumlah PPLKB secara keseluruhan di kabupaten TTU sebanyak 34 orang yang melayani akseptor KB di 24 kecamatan. Hal ini cukup memadai sehingga PPLKB dapat melaksanakan tugasnya lebih efektif dan efisien sehingga selalu terjadi peningkatan jumlah akseptor KB di kabupaten TTU dari tahun ke tahun. Salah satu faktor pendukung kegiatan penyuluhan KB di TTU sehingga terjadi peningkatan jumlah akseptor KB adalah fasilitas pendukung seperti kendaraan roda dua, alat kontrasepsi, media Bina Keluarga Balita Kit (BKB Kit) dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi Kit (KIE Kit) cukup memadai dan fasilitas tersebut dipergunakan dengan baik dan benar

oleh PPLKB di lapangan. Dengan fasilitas yang cukup memadai tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugas PPLKB di lapangan dalam meningkatkan akseptor KB di kabupaten TTU. Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat kinerja PPLKB dalam meningkatkan jumlah akseptor KB. Sesuai pengamatan dan wawancara di lapangan faktor utama yang menghambat pelaksanaan tugas PPLKB di lapangan adalah terbatasnya dana operasional di lapangan. Dengan terbatasnya dana operasional di lapangan tersebut sering membuat PPLKB tidak tepat waktu dalam melaksanakan tugas sehingga berakibat pada menurunnya motivasi PUS untuk ber - KB. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan KB dapat berjalan lancar harus didukung atau ditunjang oleh tenaga yang benar-benar profesional dan dsidukung oleh dana yang harus memadai pula. Semakin tersedianya dana operasional di lapangan yang memadai akan semakin memotivasi PPLKB dalam bekerja. Dengan kinerja PPLKB yang semakin baik maka akan semakin meningkat pula akseptor KB di kabupaten TTU sehingga dapat menekan pertumbuhan penduduk di TTU menuju keluarga sejahtera lahir dan batin.

F. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a) Kinerja Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten TTU cukup optimal. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah akseptor aktif KB kabupaten TTU pada tahun 2013 sebanyak 22.146 akseptor dengan tingkat

- persentase akseptor aktif KB terhadap PUS sebesar 68.38% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 23.615 akseptor dengan tingkat persentase akseptor aktif KB terhadap PUS sebesar 70.32%.
- b) Sumber daya manusia dalam hal ini PPLKB cukup memadai baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya sehingga semakin mendukung pelaksanaan tugas di lapangan hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah akseptor KB dari tahun ke tahun.
 - c) Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah cukup memadai seperti tersedianya kendaraan roda dua (motor), alat kontrasepsi, media Bina Keluarga Balita Kit (BKB Kit) dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi Kit (KIE Kit) cukup memadai dan fasilitas tersebut dipergunakan dengan baik dan benar oleh PPLKB di lapangan. Dengan fasilitas yang cukup memadai tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugas PPLKB di lapangan dalam meningkatkan akseptor KB di kabupaten TTU.
 - d) Terbatasnya dana operasional di lapangan sering membuat PPLKB tidak tepat waktu dalam memberikan penyuluhan KB kepada masyarakat sehingga PUS kurang termotivasi dalam mengikuti penyuluhan KB oleh PPLKB.
- ## 2. Saran
- a) Kinerja PPLKB dipertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga jumlah akseptor KB di TTU lebih meningkat lagi supaya dapat menekan laju pertumbuhan penduduk.
 - b) Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) harus tetap meningkatkan kualitas kerja dan pemerintah kabupaten perlu menambah jumlah PPLKB sesuai tingkat kepadatan penduduk.
 - c) Pemerintah kabupaten perlu menambah kendaraan operasional terutama kendaraan roda empat demi kelancaran pelaksanaan tugas PPLKB di lapangan.
 - d) Dana operasional di lapangan bagi PPLKB harus ditingkatkan demi kesejahteraan PPLKB sehingga mereka termotivasi dalam memberikan penyuluhan ber-KB.
 - e) Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) harus menghargai waktu dalam bekerja sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat terutama tepat waktu dalam memberikan penyuluhan.
 - f) Meningkatkan kesadaran akseptor KB dalam segala aspek melalui kegiatan sosialisasi dan pembekalan di tingkat desa sampai kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mangkunegara, A.A.A Prabu; 2005; *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*; Remaja Rosdakarya; Bandung
- Sugiyono; 2009; *Metode Penelitian Administrasi*; Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI); Bandung
- Widodo J.; 2004; *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*; Insan Cendika; Surabaya
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia; 2000; *Pedoman Penyusunan Pelaporan*

*Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; Lembaga
Administrasi Negara dan Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan; Jakarta*

BP2KB;2013;*Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun
2013;Kefamenanu*

BP2KB;2014;*Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun
2014;Kefamenanu*

Timor Tengah Utara Dalam Angka
;2013;BPS Kabupaten Timor
Tengah Utara,Kefamenanu

Timor Tengah Utara Dalam
Angka;2014;BPS Kabupaten
Timor Tengah Utara,Kefamenanu

Kepmenpan Nomor 120 Tahun 2004 Pasal 3
dan Pasal 4 Tentang Penyuluhan
Keluarga Berencana Nasional dan
Pelayanan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999
Tentang Keluarga Berencana